

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI BERKELANJUTAN DI INDONESIA

ASPECTS OF CIVIL LAW IN DISPUTE RESOLUTION SUSTAINABLE INVESTMENT IN INDONESIA

Yuliana Zesa Azis¹, Ahmad Ali Muddin²

¹Universitas Musamus, Email: azis@unmus.ac.id

²Univ. Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Email: aam.akademisi25@gmail.com

Abstrak

Investasi berkelanjutan memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam investasi di sektor-sektor strategis seperti energi dan infrastruktur, tantangan utama yang dihadapi adalah mengelola dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Artikel ini membahas peran hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari konflik antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan lingkungan atau sosial. Hukum perdata, melalui mekanisme seperti pengajuan gugatan di pengadilan, mediasi, dan arbitrase, berfungsi sebagai alat untuk menjembatani kepentingan yang bertentangan dan memastikan penyelesaian yang adil. Pengembangan kebijakan dan instrumen hukum yang mendukung keberlanjutan juga penting untuk memaksimalkan manfaat investasi sembari menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan.

Kata Kunci: Investasi Berkelanjutan, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa, Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan, Mekanisme Hukum, Indonesia

Abstract

Sustainable investment plays a crucial role in Indonesia's economic development by emphasizing a balance between economic growth, environmental protection, and social welfare. Despite a significant increase in investment in strategic sectors such as energy and infrastructure, the main challenge is managing the negative impact on the environment and local communities. This article discusses the role of civil law in resolving disputes arising from conflicts between economic interests and environmental or social needs. Civil law, through mechanisms such as the filing of lawsuits in court, mediation, and arbitration, serves as a tool to bridge conflicting interests and ensure fair settlements. The development of policies and legal instruments that support sustainability is also important to maximize the benefits of investment while maintaining a balance between various interests.

Keywords: Sustainable Investment, Civil Law, Dispute Resolution, Economic and Environmental Balance, Legal Mechanism, Indonesia

Pendahuluan

Investasi berkelanjutan semakin diakui sebagai elemen kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. (Masruroh & Fardian, 2022) Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam investasi di berbagai sektor strategis, seperti energi, pertambangan, dan infrastruktur. Namun, di balik pertumbuhan investasi ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu bagaimana memastikan bahwa kegiatan investasi tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat lokal. Konflik antara kepentingan ekonomi yang didorong oleh investasi dan kebutuhan untuk melindungi lingkungan serta hak-hak sosial masyarakat setempat seringkali menimbulkan sengketa yang kompleks dan sulit diselesaikan. Investasi berkelanjutan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. (Halomoun et al., 2024)

Dalam konteks ini, peran hukum perdata menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk menjembatani kepentingan yang bertentangan tersebut. Hukum perdata tidak hanya memberikan landasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang. (Purba, 2024) Dengan mekanisme yang tersedia, seperti pengajuan gugatan di pengadilan, mediasi, dan arbitrase, hukum perdata memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar.

Pentingnya hukum perdata dalam penyelesaian sengketa investasi berkelanjutan juga terletak pada kemampuannya untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Investor memerlukan kepastian hukum untuk melindungi investasi mereka, sementara masyarakat lokal dan lingkungan membutuhkan perlindungan dari dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan investasi. (Nurhamim et al., 2021) Oleh karena itu, analisis mengenai peran hukum perdata dalam konteks ini sangat relevan untuk memahami bagaimana mekanisme hukum dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana hukum perdata dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa investasi berkelanjutan, serta

bagaimana mekanisme yang tersedia dapat dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Permasalahan

Bagaimana kedudukan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa investasi berkelanjutan di Indonesia, termasuk identifikasi bentuk sengketa, mekanisme penyelesaian (litigasi dan ADR), penerapan prinsip-prinsip hukum perdata, efektivitas mekanisme penyelesaian, tantangan hukum yang dihadapi, dan solusi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa demi iklim investasi yang adil dan berkelanjutan?

Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengupas peran hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dari investasi berkelanjutan di Indonesia. Sebagai landasan utama, penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum normatif, menyelami peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi, lingkungan, dan hukum perdata. Pendekatan ini akan membantu memahami bagaimana hukum perdata, dengan prinsip-prinsipnya, dapat menjadi jembatan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seringkali bertentangan.

Untuk memperkuat analisis normatif, data empiris pendukung akan dikumpulkan. Data ini mencakup statistik sengketa investasi, efektivitas mediasi dan arbitrase, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap investasi berkelanjutan. Sumber data akan beragam, mulai dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan arbitrase, hingga laporan lembaga pemerintah dan publikasi ilmiah. Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, sementara analisis dokumen akan memfokuskan pada peraturan, putusan, dan kebijakan terkait. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan komparatif. Analisis kualitatif akan mengidentifikasi pola, tren, dan prinsip hukum yang relevan, serta menginterpretasi putusan pengadilan dan arbitrase. Analisis komparatif akan membandingkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti pengadilan, mediasi, dan arbitrase, serta membandingkan kebijakan-kebijakan investasi berkelanjutan yang ada di Indonesia.

Kerangka kerja analitis penelitian ini akan mencakup identifikasi prinsip hukum perdata yang relevan, evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, analisis dampak kebijakan pemerintah, serta identifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan hukum perdata untuk mendukung investasi berkelanjutan. Dengan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum perdata dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa investasi berkelanjutan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum.

Pembahasan

Pembangunan ekonomi Indonesia telah mencapai tahap yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu bagaimana memastikan bahwa kegiatan investasi tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat lokal. Investasi berkelanjutan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran hukum perdata menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk menjembatani kepentingan yang bertentangan tersebut.

1) Pentingnya Investasi Berkelanjutan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Investasi berkelanjutan semakin diakui sebagai elemen kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. (Masruroh & Fardian, 2022) Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam investasi di berbagai sektor strategis, seperti energi, pertambangan, dan infrastruktur. Namun, di balik pertumbuhan investasi ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu bagaimana memastikan bahwa kegiatan investasi tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat lokal. Konflik antara kepentingan ekonomi yang didorong oleh investasi dan kebutuhan untuk melindungi lingkungan serta hak-hak sosial masyarakat setempat seringkali menimbulkan sengketa yang kompleks dan sulit diselesaikan. (Halomoun et al., 2024)

Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan seringkali menyebabkan konflik antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan lingkungan. Misalnya, kegiatan pertambangan yang intensif dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal. Polusi lingkungan juga merupakan masalah yang serius, karena dapat menyebabkan penyakit dan kerusakan ekosistem. Selain itu, penggusuran masyarakat lokal untuk proyek-proyek investasi seperti pembangunan infrastruktur atau industri juga dapat menimbulkan konflik sosial yang kompleks. (Absori, 2018)

Untuk menyelesaikan sengketa ini, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Mekanisme ini harus dapat mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan kebutuhan lingkungan dan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi hijau, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. (Sawitri & Bintoro, 2010) Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat investasi sambil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung investasi berkelanjutan. Misalnya, taksonomi hijau yang sudah diinisiasi sejak tahun 2022 serta kebijakan *carbon pricing*. Beberapa catatan misalnya pembaruan taksonomi hijau menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Tantangan dalam pasar karbon diantaranya adalah partisipasi rendah dari pasar sehingga menurunkan permintaan kredit karbon. Harga karbon yang lebih tinggi penting untuk mendorong adopsi teknologi rendah karbon, serta mendorong bisnis untuk mencari cara yang lebih efisien dalam mengurangi emisi dan mendorong pengembangan teknologi yang lebih bersih. (OJK, 2022)

Selain itu, Indonesia juga perlu mengevaluasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini akan memunculkan biaya tinggi apabila tidak sesuai. Terakhir, kerja sama ekonomi internasional, sebagai katalis dan akselerator dekarbonisasi ekonomi untuk memberikan tekanan eksternal, dapat secara signifikan mempengaruhi ketegasan langkah-langkah Indonesia dalam memenuhi komitmen iklimnya. (Hidayat et al., 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menawarkan beberapa proyek investasi berkelanjutan yang menarik bagi investor internasional. Misalnya, proyek pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Toba Caldera Resort oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dengan estimasi nilai investasi sebesar USD1,7 miliar. Selain itu, proyek pengembangan Industri Motor Listrik untuk Kendaraan Listrik di Bekasi, Jawa Barat; Fasilitas Stasiun Pengisian Daya Terintegrasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan Lebak, Banten; serta Industri Bioethanol di Bojonegoro, Jawa Timur dengan total estimasi nilai investasi sebesar USD276 juta. (Manuhutu, 2022)

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi hijau, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat investasi sambil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

2) Peningkatan Potensi Sengketa Akibat Konflik Antara Investasi dan Kebutuhan Lingkungan atau Sosial

Konflik antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan lingkungan atau sosial seringkali menimbulkan sengketa yang kompleks dan sulit diselesaikan. Sengketa ini dapat timbul dari berbagai aspek, seperti penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, polusi lingkungan, dan pengusuran masyarakat lokal untuk proyek-proyek investasi. (Setiady, 2010) Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa ini.

Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan seringkali menyebabkan konflik antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan lingkungan. Misalnya, kegiatan pertambangan yang intensif dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal. Polusi lingkungan juga merupakan masalah yang serius, karena dapat menyebabkan penyakit dan kerusakan ekosistem. Selain itu, pengusuran masyarakat lokal untuk proyek-proyek investasi seperti pembangunan infrastruktur atau industri juga dapat menimbulkan konflik sosial yang kompleks. (Liey, 2018)

Untuk menyelesaikan sengketa ini, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Mekanisme ini harus dapat mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan kebutuhan lingkungan dan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi hijau, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. (Sari et al., 2021) Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat investasi sambil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

3) Peran Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Berkelanjutan

Dalam konteks ini, peran hukum perdata menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk menjembatani kepentingan yang bertentangan tersebut. (Purba, 2024) Hukum perdata tidak hanya memberikan landasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang. Dengan mekanisme yang tersedia, seperti pengajuan gugatan di pengadilan, mediasi, dan arbitrase, hukum perdata memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. (Pareres, 2024)

Pengajuan gugatan di pengadilan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa melalui proses hukum yang formal. Pengadilan dapat menegakkan hak-hak para pihak yang terlibat dan memberikan keputusan yang adil berdasarkan pada bukti-bukti yang dipresentasikan. (Syaifuddin, 2011) Namun, proses pengadilan juga dapat memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang signifikan, sehingga tidak semua pihak mungkin memiliki kemampuan untuk melanjutkannya.

Mediasi merupakan alternatif yang lebih fleksibel dan efisien. Dalam mediasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang adil. (Nugroho, 2022) Mediasi dapat dilakukan secara formal atau informal dan seringkali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan. Selain itu, mediasi juga memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan yang baik setelah sengketa diselesaikan.

Arbitrase adalah mekanisme lain yang efektif untuk menyelesaikan sengketa melalui proses hukum yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan. (Azis, 2024) Dalam arbitrase, para pihak yang terlibat dalam sengketa memilih panel arbitrase yang netral untuk menegakkan hak-hak mereka. Keputusan arbitrase biasanya final dan dapat diimplementasikan dengan cepat, sehingga sangat berguna dalam situasi yang memerlukan penyelesaian cepat. (Setiady, 2010)

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengembangkan struktur hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung investasi berkelanjutan. Misalnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) telah diperbarui untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam struktur perusahaan. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Anak telah diperbarui untuk memasukkan ketentuan yang lebih ketat tentang perlindungan anak dalam proses investasi. (Shrishti, 2022)

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan beberapa instrumen kebijakan untuk mendukung investasi berkelanjutan. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan sistem sertifikasi hijau yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Kementerian Perindustrian telah mengembangkan program untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. (Raditya, 2024)

Dengan demikian, peran hukum perdata dalam menjembatani kepentingan yang bertentangan dalam investasi berkelanjutan sangat penting. Dengan menggunakan mekanisme pengajuan gugatan di pengadilan, mediasi, dan arbitrase, para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Selain itu, pengembangan struktur hukum dan instrumen kebijakan yang lebih komprehensif juga dapat membantu mendukung investasi berkelanjutan di Indonesia.

4) Mekanisme Hukum Perdata yang Tersedia untuk Melindungi Hak-Hak Investor dan Pihak Terkait Lainnya

Pentingnya hukum perdata dalam penyelesaian sengketa investasi berkelanjutan juga terletak pada kemampuannya untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. (Nurthika, 2010) Investor memerlukan

kepastian hukum untuk melindungi investasi mereka, sementara masyarakat lokal dan lingkungan membutuhkan perlindungan dari dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan investasi. Oleh karena itu, analisis mengenai peran hukum perdata dalam konteks ini sangat relevan untuk memahami bagaimana mekanisme hukum dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. (Rahmawati & Abubakar, 2019)

Hukum perdata memainkan peran kunci dalam menjembatani kepentingan yang bertentangan dalam investasi berkelanjutan. Dengan menggunakan mekanisme pengajuan gugatan di pengadilan, mediasi, dan arbitrase, hukum perdata memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. (Istiawati, 2021) Pengajuan gugatan di pengadilan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa melalui proses hukum yang formal. Mediasi merupakan alternatif yang lebih fleksibel dan efisien, sementara arbitrase dapat menyelesaikan sengketa melalui proses hukum yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan. (Maheswara, 2023)

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan struktur hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung investasi berkelanjutan. Misalnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) telah diperbarui untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam struktur perusahaan. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Anak telah diperbarui untuk memasukkan ketentuan yang lebih ketat tentang perlindungan anak dalam proses investasi. (Asmara et al., 2019)

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menawarkan beberapa proyek investasi berkelanjutan yang menarik bagi investor internasional. Misalnya, proyek pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Toba Caldera Resort oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dengan estimasi nilai investasi sebesar USD1,7 miliar. Selain itu, proyek pengembangan Industri Motor Listrik untuk Kendaraan Listrik di Bekasi, Jawa Barat; Fasilitas Stasiun Pengisian Daya Terintegrasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan Lebak, Banten;

serta Industri Bioethanol di Bojonegoro, Jawa Timur dengan total estimasi nilai investasi sebesar USD276 juta. (Manuhutu, 2022)

Dengan demikian, peran hukum perdata dalam menjembatani kepentingan yang bertentangan dalam investasi berkelanjutan sangat penting. Dengan menggunakan mekanisme pengajuan gugatan di pengadilan, mediasi, dan arbitrase, para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Selain itu, pengembangan struktur hukum dan instrumen kebijakan yang lebih komprehensif juga dapat membantu mendukung investasi berkelanjutan di Indonesia.

Investasi berkelanjutan sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Konflik yang timbul dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan dampak sosial dari proyek investasi menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Hukum perdata berperan penting dalam menjembatani kepentingan yang bertentangan, memberikan perlindungan bagi investor, masyarakat lokal, dan lingkungan, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan adil.

Kesimpulan

Investasi berkelanjutan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang mencakup keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun terdapat peningkatan investasi di sektor-sektor strategis seperti energi dan infrastruktur, tantangan besar adalah mengelola dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Hukum perdata memainkan peran kunci dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari konflik antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan lingkungan atau sosial. Mekanisme hukum seperti pengajuan gugatan, mediasi, dan arbitrase membantu menjembatani kepentingan yang bertentangan dan memastikan penyelesaian yang adil. Selain itu, pengembangan kebijakan dan instrumen hukum yang mendukung keberlanjutan juga penting untuk memaksimalkan manfaat investasi sembari menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan.

Dengan demikian, peran hukum perdata dalam menjembatani kepentingan yang bertentangan dalam investasi berkelanjutan sangat penting.

Dengan menggunakan mekanisme pengajuan gugatan di pengadilan, mediasi, dan arbitrase, para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Selain itu, pengembangan struktur hukum dan instrumen kebijakan yang lebih komprehensif juga dapat membantu mendukung investasi berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Absori, A. (2018). Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 97–104. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.5539>
- Asmara, T. T. P., Ikhwanasyah, I., & Afriana, A. (2019). Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 118–136. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.125-143>
- Azis, Y. Z. (2024). Syarat Sahnya Kontrak dan Berakhirnya Kontrak. In *Buku Ajar Hukum Perancangan Kontrak* (1 ed., hal. 45–64). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Halomoun, Prince, H., Heston, C., Loso, R., Faizah, J. A., Ilma, N., Putra, A., Fitriyana, E., Maichal, R. M., Boari, Y., Dwi, R., Saktisyahputra, L., Sapta, I. B., Margoutomo, A., Hafidz, D., & Mardhana, A. (2024). *Sustainable Economic Development (Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia)* (Nomor May). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hidayat, T., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan , Kebudayaan , Riset , dan Teknologi : Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 12(1), 85–94.
- Istiawati, S. (2021). Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen. *Juripol*, 4(1), 208–216. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11034>
- Liey, J. F. (2018). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Investasi Asing menurut Convention on The Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other State 1965. *Lex Et Societatis*, 66(2), 143–149.

- Maheswara, J. (2023). Efektivitas Klausul Definisi Investasi & Investor Pada Bilateral Investment Treaty Dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Antara Investor Dan Host State Serta Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Icsid (Studi Kasus Sengketa Investasi. *HUKUM Pidana dan Pembangunan HUKUM*, Vol 6 no., 20–36.
- Manuhutu, O. R. . (2022). *Laporan Investasi* (Vol. 19, Nomor 5).
- Masruroh, N., & Fardian, I. (2022). Ekonomi Sirkular: Sebuah Solusi Masa Depan Berkelanjutan. In *Jejak Pustaka*.
- Nugroho, M. H. Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Terhadap Penanam Modal Asing Yang Melanggar Kontrak Di Indonesia. *Lakidende Law Review*, 1(3), 261–276. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.33>
- Nurhamim, D. P., Chandrawulan, A. A., & Trisnamansyah, P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor Akibat Pemutusan Sepihak Perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate and Transfer. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 4(2), 315–331. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.609>
- Nurthika, G. (2010). *Kepastian Hukum dalam Investasi: Studi Kasus PT Billabong Indonesia v.CV Bali Balance*. Universitas Indonesia.
- OJK. (2022). *Taksonomi Hijau* (1.0). Otoritas Jasa Keuangan.
- Pareres, S. K. (2024). Pengembangan Framework Hukum untuk Kerjasama Investasi antara Pemerintah dan Badan Usaha Development of a Legal Framework for Investment Cooperation between the Government and Business Entities. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 2(1), 1796–1802.
- Purba, T. P. (2024). Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1–13. <https://coursework.uma.ac.id/index.php/fakum/article/view/708>
- Raditya, A. (2024). Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 567–578. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1992>

- Rahmawati, E., & Abubakar, L. (2019). Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal : Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi REPO. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 130–149. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.8>
- Sari, A. U., Lubis, F. N., & Mujib, A. (2021). Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Asih Ulum Sari, Fauziah Nur Lubis dan Abdul Mujib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 1–32.
- Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 163–174. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.149>
- Setiady, A. (2010). *Penyelesaian Sengketa Dibidang Penanaman Modal Asing : Insentif Bagi Investor*. Universitas Indonesia.
- Shrishti, S. (2022). Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Bisnis Asing. *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA) UNTAR*, 2(1), 9–18.
- Syaifuddin, M. (2011). Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(1), 58–70. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1320>